



panrb

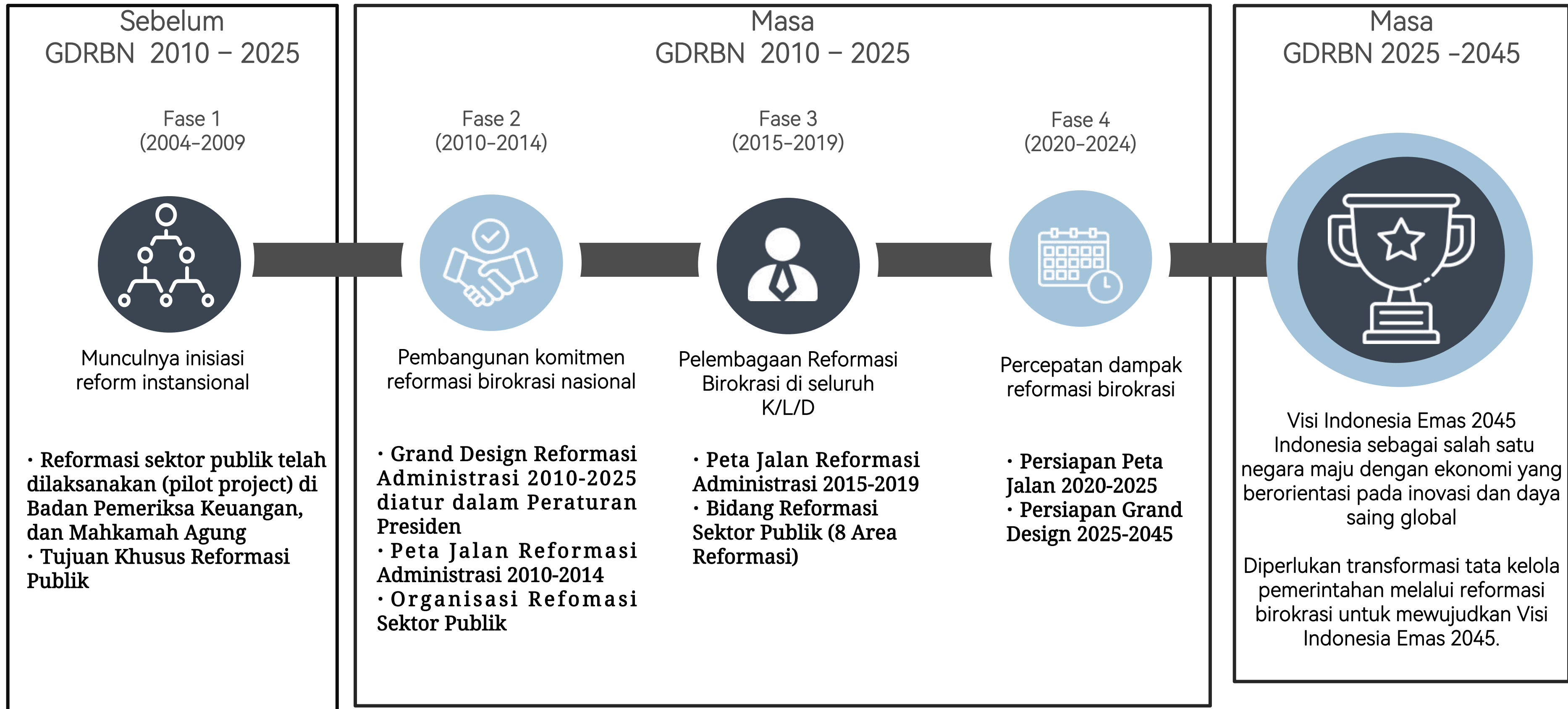
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI

(SE NO 6/2025)

NOVI KAVITA SARI, 2025

PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI HINGGA TAHUN 2024



BIROKRASI YANG SEDERHANA, LINCAH DAN CEPAT



41 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai



55.649 struktur organisasi pada 104 K/L telah disederhanakan dan sebanyak **44.870** Jabatan administrasi telah dialihkan ke Jabatan Fungsional*



45 Jabatan Fungsional baru (berdasarkan keahlian), **124** usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi



91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL



Sampai dengan tahun 2022, implementasi SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar **±121,9 Triliun**

BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN



Terbentuk **2.624** unit percontohan pelayanan prima & anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum



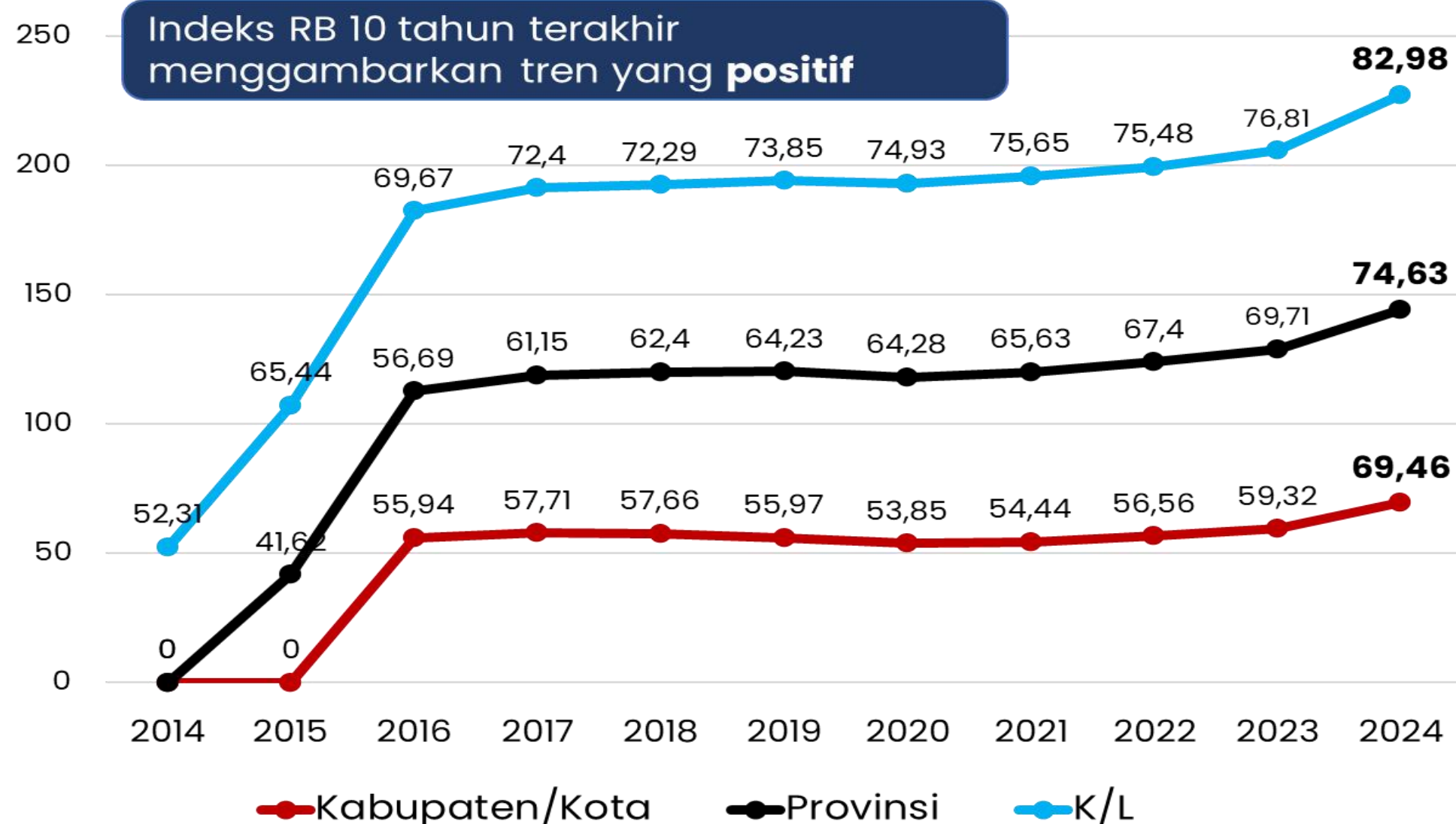
Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan **STRANAS PK**



Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan **272 Mall Pelayanan Publik (MPP) & 91 MPP Digital** di daerah

Ket: *sebelum Kabinet Merah Putih

REFORMASI BIROKRASI: APA YANG SUDAH DIHASILKAN?



Catatan:

- Pada evaluasi RB tahun 2014, hanya Kementerian/Lembaga yang dievaluasi
- Pada evaluasi RB tahun 2015, dilakukan pilot project evaluasi RB pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Target RPJMN 2024: K/L: 85% | Prov: 85% | Kab/Kota: 70%

TARGET RPJMN 2024: K/L: 100% | Prov: 74,63% | Kab/Kota: 69,46%

Realisasi 2024: K/L: 85,98% | Prov: 74,63% | Kab/Kota: 69,46%

1 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan. RB diarahkan untuk membangun pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (human-based) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2 Agenda Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029

Agenda RB pada periode 2025–2029 tertuang dalam RMRBN 2025-2029 yang merupakan tahap awal pelaksanaan GDRBN 2025–2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan digital governance menuju human-based governance.

3 Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata

Reformasi Birokrasi Menuju Transformasi Birokrasi Digital

1

ENGINES OF DEVELOPMENT

Fokus Pelaksanaan RB lebih banyak kepada **perbaikan internal Birokrasi** dengan **8 area perubahan** sebagai aspek yang diintervensi. Reformasi Birokrasi ini **bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi sebagai bagian dari mesin (tools) Pembangunan.**

Grand design RB
Perpres no 81 Tahun 2010

2

RB BERDAMPAK

Fokus Pelaksanaan RB terbagi menjadi double track:

1. **RB General** : bertujuan untuk terus memperbaiki birokrasi sehingga dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang dicita-citakan. (menyelesaikan permasalahan hulu)
2. **RB Tematik** : Sebagai upaya RB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Nyata di masyarakat (Menyelesaikan Permasalahan hilir).

Penajaman Road Map RB 2020-2024
PermenPANRB no 3 Tahun 2023

3

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH

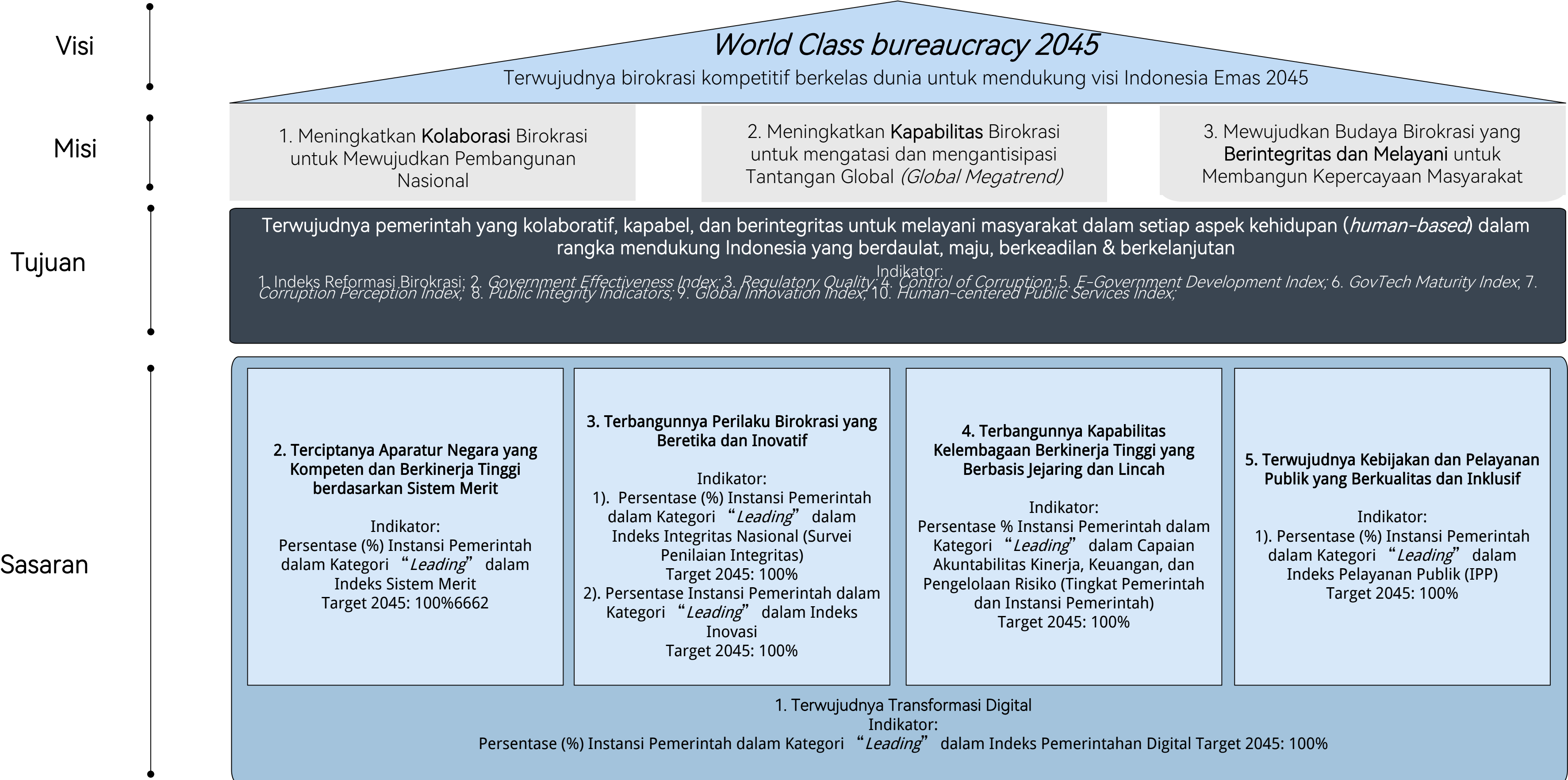
Reformasi Birokrasi kedepan akan difokuskan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan **Human-Based Public Governance** dengan mengembangkan: **Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/ Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure, Digital Services.**

Arah Kebijakan
Reformasi Birokrasi Kedepan
(Kerangka GDRBN 2025-2045)

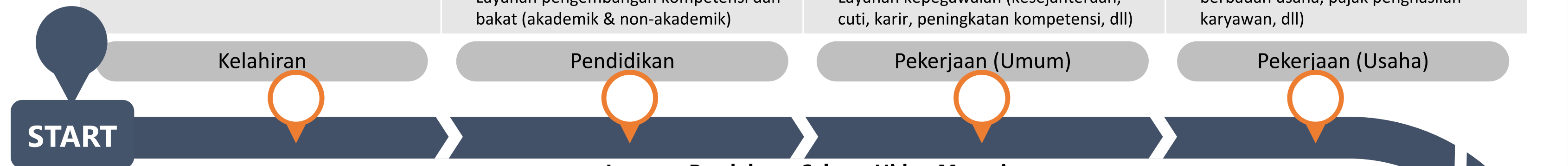
PELAYANAN PRIMA



Kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045



- | | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Layanan kependudukan (akta/KTP anak) Layanan bantuan sosial Layanan pengembangan bakat anak usia dini | <ul style="list-style-type: none"> Layanan kependudukan (E-KTP) Layanan sekolah dasar-menengah-atas (negeri - swasta, formal - non-formal) Layanan Pendidikan tinggi (PT Negeri, PT Swasta, kedinasan) Layanan bantuan Pendidikan tinggi (beasiswa pemerintah) Layanan pengembangan kompetensi dan bakat (akademik & non-akademik) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan pengembangan keahlian dan kompetensi (Prakerja, BPJS Ketenagakerjaan) Layanan akselerasi pendidikan dan dunia kerja (CASN, Magang Bersama, dll) Layanan Keuangan (Gaji, NPWP, Pajak Penghasilan, perbankan) Layanan kepegawaian (kesejahteraan, cuti, karir, peningkatan kompetensi, dll) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan Bantuan permodalan (BPUM UMKM) Layanan perizinan (OSS) Layanan informasi komunitas, rantai suplai, ekspansi perusahaan, dan pendidikan bisnis/keuangan lainnya Layanan Keuangan Perusahaan (Pajak berbadan usaha, pajak penghasilan karyawan, dll) |
|---|---|--|---|



Layanan Pendukung Selama Hidup Manusia

IDENTIFIKASI LAYANAN BERDASARKAN SIKLUS HIDUP MANUSIA



- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Layanan Internal Pemerintah • Pengamanan Data • Manajemen ASN • Pajak | <ul style="list-style-type: none"> Layanan Kesehatan • Layanan bantuan Kesehatan (BPJS) • Layanan peningkatan gizi • Layanan fasilitas kesehatan • Layanan <i>telemedicine</i> • Layanan kesehatan mental (psikolog atau psikiater) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan Transportasi • Layanan transportasi umum (kereta, pesawat, bis, angkutan lokal) • Layanan perizinan (SIM, STNK, paspor) • Layanan keuangan (pajak kendaraan) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan Informasi Umum & Pariwisata dan Budaya • Layanan informasi umum (cuaca, iklim, kualitas udara, bencana, kemacetan) • Layanan kelistrikan • Layanan informasi pendidikan warga negara (anti-narkoba, dll) • Layanan informasi pariwisata & budaya (destinasi, dll) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan Hak Warga Negara, Partisipasi Publik, dan Komunitas • Layanan bantuan hukum • Layanan pengaduan • Layanan pemberdayaan masyarakat (musyawarah dalam perencanaan pembangunan, komunitas, dll) • Layanan pemberian hak suara (pemilu) |
| <ul style="list-style-type: none"> Layanan kepegawaian (pensiun, pajak) • Layanan keuangan (tunjangan hari tua, asuransi) • Layanan kesehatan usia lanjut • Layanan administrasi hukum dan warisan • Layanan kependudukan (tutup usia dan pemakaman) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan perencanaan keluarga (KB, keuangan, pendidikan calon orang tua, dll) • Layanan informasi parenting, anak, dll • Layanan kepegawaian (cuti) • Layanan keyangan (tunjangan) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan administrasi pernikahan • Layanan kependudukan (KK, E-KTP, dll) • Layanan keuangan (NPWP, dll) • Layanan pengajuan perceraian (akta perceraian) | <ul style="list-style-type: none"> Layanan pertahanan (sertifikat tanah, dll) • Layanan perizinan (IMB) • Layanan Keuangan (PBB) • Layanan informasi tanah, izin, pajak, pembiayaan KPR, dll • Layanan bantuan/subsidi pemerintah | |

Trajectory (5 Tahunan) Reformasi Birokrasi 2025-2045

Tujuan GDRBN

Sasaran GDRBN

Terwujudnya Transformasi Digital

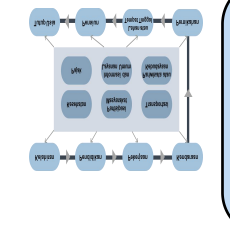
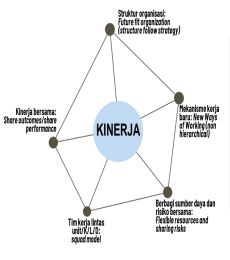
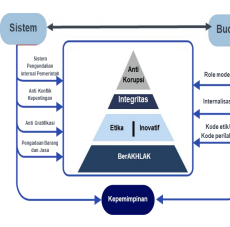
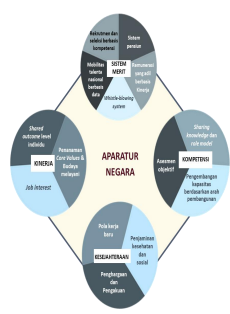
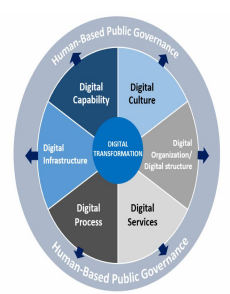
Terciptanya Aparatur Negara yang Berkinerja Tinggi Berdasarkan Sistem Merit

Terbangunnya perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif

Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah

Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Digital Governance		Whole of Governance Menuju Human-Based Governance	
Smart Government		Smart Nation	
<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya kebijakan nasional Pemerintah Digital dan Transformasi Digital Nasional, diselaraskan dengan perkembangan terkini di dunia dan kemajuan teknologi. Peningkatan kapabilitas dan budaya ASN Digital. Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan transformasi digital. Transformasi layanan pemerintah pada K/L melalui pemanfaatan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang berorientasi kemudahan pengguna (user centric). Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial pada layanan strategis pemerintah. Terbentuknya Lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintah Pencapaian peringkat 50 EGD 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya kebijakan nasional turunan Pemerintah Digital dan Transformasi Digital Nasional. Peningkatan literasi Digital masyarakat. Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan transformasi digital. Transformasi layanan pemerintah pada K/L/D melalui pemanfaatan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang berorientasi kemudahan pengguna (user centric). Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial pada layanan pemerintah. Operasional Layanan Digital Nasional pada Lembaga publik pelaksana transformasi digital pemerintah Pencapaian peringkat 40 EGD 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan interoperabilitas layanan digital Pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN, melalui pemanfaatan interoperabilitas antar DPI Penerapan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (masyarakat digital) Perluasan peningkatan literasi digital masyarakat Pemanfaatan Big Data, Kecerdasan Artifisial, dan teknologi maju lainnya pada Layanan pemerintah Pencapaian peringkat 30 EGD 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan interoperabilitas layanan digital Pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan Asia Pasifik, melalui pemanfaatan interoperabilitas antar DPI Penerapan lanjutan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (masyarakat digital) Pengembangan pemanfaatan Big Data, Kecerdasan Artifisial, dan teknologi maju lainnya pada Layanan pemerintah Pencapaian peringkat 20 EGD
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengadaan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk <i>critical jobs</i> dan prioritas pembangunan Akselerasi penerapan manajemen talenta Pengembangan pola karir Jabatan Fungsional Pengembangan <i>Job Attractiveness</i>, <i>Total Reward</i> dan <i>Employer Branding</i> Pengembangan platform digital yang mendukung manajemen ASN sesuai prinsip merit 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan <i>talent pool</i> Pemanfaatan aplikasi <i>human resources integrated system</i> untuk pengembangan dan mobilitas ASN Penerapan <i>blended learning approach</i> Reviu sistem penggajian dan pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>AI-driven career pathing</i> Penerapan <i>personalized learning path and gamification</i> Reviu sistem pengisian jabatan pimpinan tinggi Reviu <i>performance-based reward</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>framework</i> meritokrasi dan <i>diversity</i> (keberagaman) Pengembangan <i>employee resource group</i> (ERG) Reviu gap kompetensi dan kebutuhan di masa mendatang
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem integritas dan pengawasan Pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan Perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa Penanaman <i>core values</i> ASN Komitmen implementasi kebijakan dan/atau putusan peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan <i>whistle-blower protection</i> Pengembangan kerangka integritas untuk proyek infrastruktur publik Asesmen terhadap penerapan <i>core values</i> ASN Pengembangan <i>feedback-loop</i> dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>platform culture</i> Pengembangan budaya dan perilaku ESG Pengembangan <i>digital ethics</i> Penguatan mekanisme sanksi untuk pembentukan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan pengawasan Reviu strategi <i>anti-bribery and public integrity</i> Pengembangan <i>automated and preventive compliance</i>
<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan perencanaan pembangunan, manajemen kinerja dan manajemen risiko Membangun struktur dan mekanisme kerja <i>shared-outcome</i> berbasis kolaborasi dan jejaring Melakukan <i>capability review</i> untuk pencapaian kinerja organisasi Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan aset 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Risk-Based Planning</i> Pengembangan desain kelembagaan berbasis kinerja Pengembangan <i>cross-functional matrix team</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan mekanisme <i>flexible resources</i> antar instansi pemerintah Pengembangan desain kelembagaan berbasis <i>holacracy (wework)</i> Reviu pelaksanaan sistem manajemen kinerja organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan desain kelembagaan berbasis jejaring Penyempurnaan sistem manajemen kinerja berbasis <i>shared-outcome</i>
<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan ekosistem <i>evidence-based policy</i> Pengembangan layanan berbasis <i>life-event</i> dan <i>omnichannel</i> Pengembangan <i>co-design public services</i> Perluasan inklusivitas layanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kepatuhan terhadap standar layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>digital ready policy</i> Pengembangan <i>seamless user experience</i> untuk pelayanan publik <i>Refocusing</i> reformasi layanan sesuai dengan prioritas pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>AI-Based Policy</i> dengan <i>crowdsourcing ideas</i> Pengembangan <i>tailor-made services</i> Penerapan <i>public value co-creation</i> <i>Refocusing</i> reformasi layanan publik berdampak perubahan iklim dan kejahatan siber 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan <i>personalized and inclusive services</i> Reviu <i>equity</i> dalam penerapan pelayanan dan kebijakan publik



RB BERDAMPAK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENDUKUNG VISI MISI PRESIDEN

01 Inpres 8 Tahun 2025

RB PENGENTASAN KEMISKINAN

Birokrasi mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran, integrasi, kolaborasi, sinkronisasi program antar K/L serta melibatkan peran berbagai pihak.

RB yang kolaboratif memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan nasional

02 PP 28 Tahun 2025

RB PENINGKATAN INVESTASI

Birokrasi mampu menciptakan iklim investasi yang baik melalui penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, mempercepat dan mempermudah proses perizinan, meningkatkan koordinasi antar-instansi, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik.

RB mendorong kemudahan investasi serta berujung pada meningkatnya realisasi investasi nasional

03 Keppres 1 Tahun 2025

RB MENDORONG HILIRISASI

Birokrasi mendukung percepatan hilirisasi SDA dan mewujudkan kemandirian & ketahaan energi melalui penyelerasan kebijakan, penyediaan lahan, kemudahan pemberian izin berusaha dan penyelesaian berbagai hambatan melalui kolaborasi lintas kewenangan antar K/L/PD.

RB mampu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

04 Inpres 3 Tahun 2025

RB MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Birokrasi mendukung swasembada pangan melalui transformasi pengelolaan pertanian tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluh pertanian efisiensi distribusi, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian

RB memberikan dampak pada peningkatan ketahanan pangan Nasional

05 Inpres 5 Tahun 2025

RB MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN

Birokrasi mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan dan tata kelola kesehatan public untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan

RB dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

06 Inpres 7 Tahun 2025

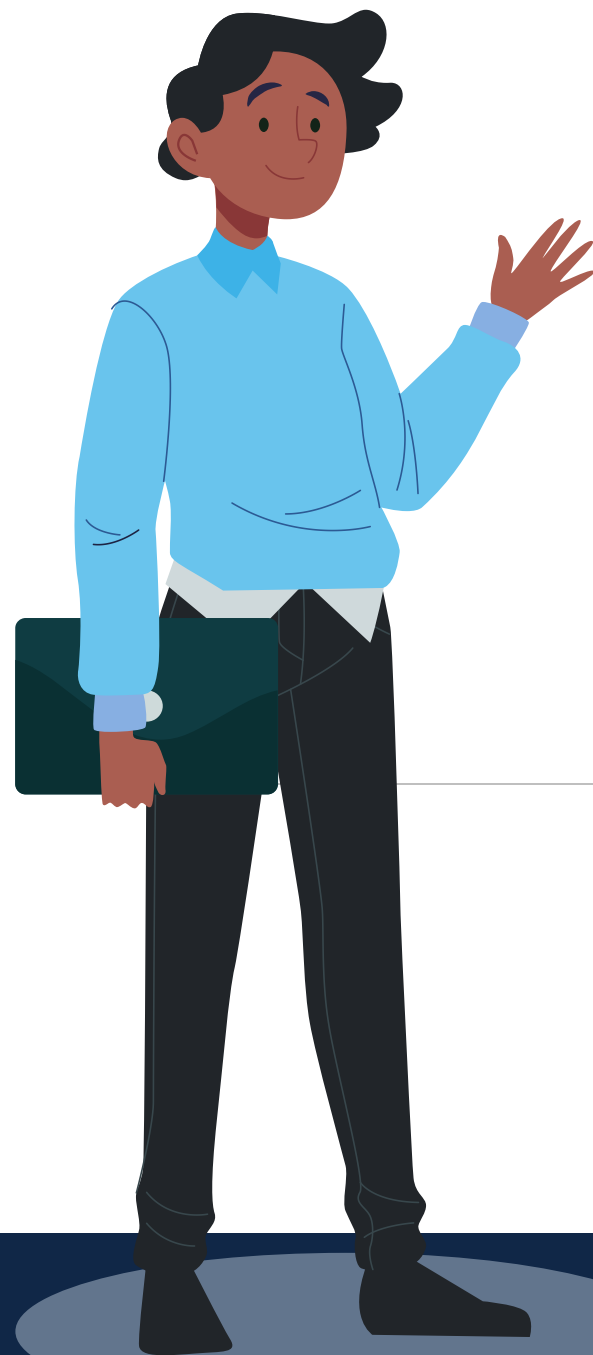
RB MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

Birokrasi mendorong percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045 melalui perbaikan tata Kelola layanan Pendidikan secara menyeluruh.

RB dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan



MEKANISME EVALUASI RB TAHUN 2025



Acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Perpres No
12/2025

tentang RPJMN 2025-2029



KepmenpanRB No
182/2024

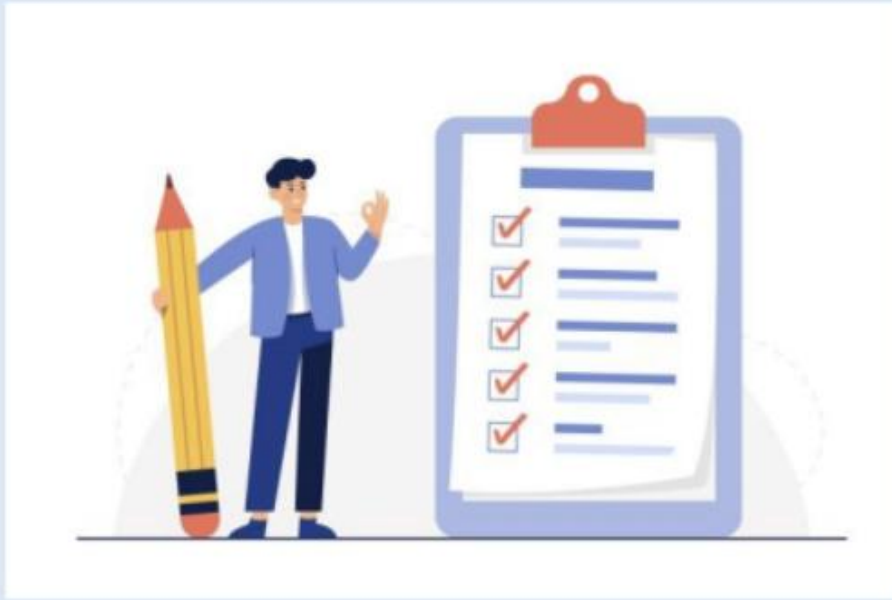
tentang petunjuk teknis
pelaksanaan Evaluasi
Reformasi Birokrasi pada
tahun 2024



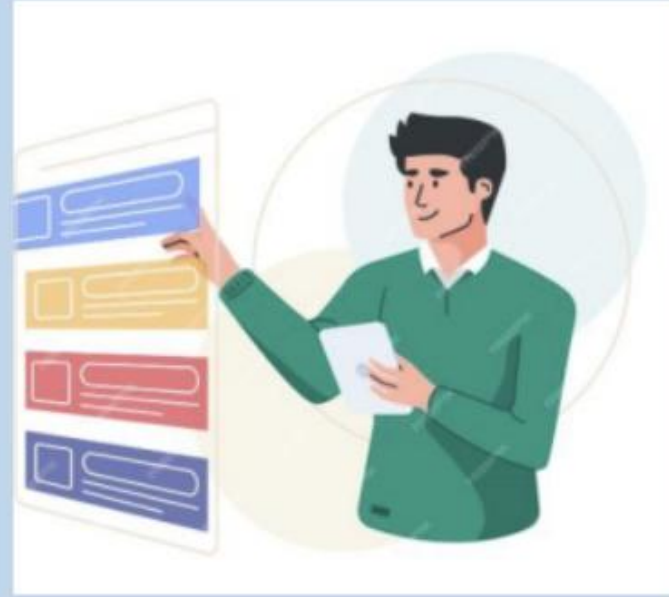
SE Menpan No
6/2025

tentang Penerapan RB pada
periode transisi tahun 2025

MANAJEMEN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN



Rencana Aksi RB General dan Tematik disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024.



Selain itu, **Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah** diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 4 (tiga) tema RB Tematik baru, yaitu:

1. RB Mendorong Hilirisasi,
2. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan
3. RB Mendukung Ketahanan Pangan
4. RB Mendorong Akses, Kualitas, Layanan dan Mutu Pendidikan

Sebagai bentuk internalisasi dan Komitmen dukungan terhadap prioritas pembangunan Tahun 2025–2029



Pengisian Rencana Aksi Tahun 2025 dilakukan melalui Portal RB, dengan periode pengisian dimulai pada bulan **Agustus 2025** dan berakhir pada periode **Monitoring Tindak Lanjut** oleh TPN pada bulan **November 2025**, dan akan dibuka kembali pada bulan **Januari 2026** untuk pembaruan data capaian triwulan IV tahun 2025

RB GENERAL

Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.

Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari K/L Meso akan menggunakan:

- a. **Nilai terbaru, apabila K/L Meso melaksanakan evaluasi di Tahun 2025; atau**
- b. **Nilai tahun sebelumnya, apabila K/L Meso tidak melaksanakan evaluasi di Tahun 2025**

RB TEMATIK

Penilaian Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas:

- a. Rencana tindak lanjut dan hasil monev pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi; sedangkan
- b. 3 (tiga) tema RB Tematik lainnya (Digitalisasi Pemerintahan Pengentasan Stunting, Pengendalian Inflasi, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.

Khusus untuk 3 (tiga) tema RB Tematik baru (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan RB Mendorong Ketahanan Pangan), TPN akan melakukan review terhadap Rencana Aksi dan laporan monev yang disusun oleh K/L dan Pemda, dengan catatan:

- a. Review tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya.
- b. **Hasil review atas 3 (tiga) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.**

MEKANISME TEKNIS RENCANA AKSI RB GENERAL

- Instansi pemerintah perlu menginput rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General sebagai tindak lanjut atas catatan rekomendasi tahun 2024.
- Pengisian rencana aksi dimulai dengan menetapkan baseline dan target untuk masing-masing indikator kegiatan utama.
- Rencana aksi yang diinput tidak terbatas pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III, namun juga mencakup rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II.
- Selain itu, jika instansi pemerintah telah memiliki dan melaksanakan rencana aksi pada Triwulan I dan II, maka capaian dari rencana aksi tersebut juga perlu diinput ke dalam Portal RB.

MEKANISME TEKNIS RENCANA AKSI RB TEMATIK

- Instansi Pemerintah hanya perlu menginput rencana aksi RB Tematik yang sesuai dengan arah tematik terbatu 2025-2029
 - Tema yang perlu diinput meliputi
 - a. Pengentasan Kemiskinan
 - b. Peningkatan Investasi
 - c. Mendorong Hilirisasi
 - d. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
 - e. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
 - f. Mendorong Peningkatan Akses, Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan
 - Pada 4 tema tematik terbaru, instansi pemerintah hanya cukup menginput rencana aksi
 - Perumusan rencana aksi RB Tematik menggunakan pendekatan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

BASELINE INDEKS RB BAGI K/L DI KABINET MERAH PUTIH

1

K/L baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi yang berasal dari 1 K/L, dapat menggunakan nilai indeks RB dari K/L sebelum dipisah.

2

K/L baru yang dibentuk dari penggabungan fungsi lebih dari 1 K/L, dapat menggunakan nilai indeks RB dari K/L yang proporsi pengabungannya paling dominan.

3

K/L baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya sudah ada, dapat menggunakan nilai indeks RB dari K/L lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke K/L yang baru tersebut



panrb

KEMENTERIAN
PENYAYOGIAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BERGERAK UNTUK
BIROKRASI
BERDAMPAK

TERIMA KASIH

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 www.kempan.go.id

  @Kementerian PANRB